E-ISSN: 3025-4922
DINASTI ACCOUNTING REVIEW
https://dinastires.org/DAR dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/dar.v3i4.
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Determinan Belanja Program Disabilitas Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia

Nurvera Septiana[1], Henny Murtini[2]
[1]Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, nurverasepti@students.unnes.ac.id
[2]Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, hennymurtini@mail.unnes.ac.id

Corresponding Author: hennymurtini@mail.unnes.ac.id[2]

Abstract: *Disability in local government plays an important role in supporting inclusive development. This study aims to analyze the influence of Fiscal Capacity, Inclusive Regulations, and Social Spending on Disability Programs with Poverty Level as a moderating variable using 1,040 observation units and logistic regression. The results show that Fiscal Capacity has a significant effect on Disability Program Spending, while Inclusive Regulations do not. Social Spending only has an effect in the initial model before the addition of moderating and control variables. Poverty level can strengthen the influence of Fiscal Capacity and Inclusive Regulations on Disability Program Spending, but does not strengthen the influence of Social Spending. These findings indicate that regional fiscal capacity and socioeconomic conditions play an important role in encouraging more inclusive budget allocations for people with disabilities.*

Keyword: *Disability Program Spending, Fiscal Capacity, Inclusive Regulation, Poverty Level, Local Government.*

Abstrak: Belanja Program Disabilitas pada pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pembangunan yang inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kapasitas Fiskal, Regulasi Inklusif, dan Belanja Sosial terhadap Program Disabilitas dengan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel moderasi menggunakan 1.040 unit observasi dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Program Disabilitas, sedangkan Regulasi Inklusif tidak berpengaruh signifikan. Belanja Sosial hanya berpengaruh pada model awal sebelum ditambahkan variabel moderasi dan variabel kontrol. Tingkat kemiskinan mampu memperkuat pengaruh Kapasitas Fiskal dan Regulasi Inklusif terhadap Belanja Program Disabilitas, namun tidak memperkuat pengaruh Belanja Sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah dan kondisi sosial ekonomi berperan penting dalam mendorong alokasi anggaran yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Belanja Program Disabilitas, Kapasitas Fiskal, Regulasi Inklusif, Tingkat Kemiskinan, Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Ketimpangan akses bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih menjadi tantangan dalam pembangunan sosial, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih cukup besar, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Sejumlah daerah juga masih menghadap keterbatasan fasilitas publik ramah disabilitas dan program perlindungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan penyandang disabilitas lebih rentan mengalami kemiskinan dan keterbatasan partisipasi sosial maupun ekonomi. Pelayanan publik yang inklusif diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas serta pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. Pelayanan publik yang inklusif juga berperan dalam mendorong pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan melalui perluasan akses lebih merata bagi kelompok rentan (Kafaa, 2023).

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah. Kewenangan tersebut mencakup penyediaan layanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan, program, dan fasilitas publik yang mendukung aksesbilitas. Pemerintah daerah berperan dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak dan pelayanan publik yang setara tanpa adanya diskriminasi (Marsitadewi, 2022). Pelaksanaan program disabilitas memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar dapat berjalan secara optimal. Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi sosial penyandang disabilitas (June et al., 2023).

Alokasi belanja program disabilitas di Indonesia masih belum merata antar daerah. Sejumlah pemerintah daerah telah menyediakan anggaran bagi program disabilitas, sedangkan daerah lainnya masih terbatas. Perbedaan kapasitas keuangan daerah memengaruhi besarnya alokasi anggaran program disabilitas. Prioritas belanja daerah lebih berfokus pada sektor tertentu juga menyebabkan program disabilitas kurang diperhatikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dukungan anggaran program disabilitas antar daerah. Kota Surakarta menjadi salah satu daerah yang telah mendukung kepentingan penyandang disabilitas melalui kebijakan anggaran, termasuk alokasi dana untuk program pemberdayaan penyandang disabilitas (Pudyatmoko & Indra, 2017).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung program disabilitas tidak terlepas dari kondisi kapasitas fiskal yang dimiliki setiap daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi cenderung memiliki kemampuan pendanaan yang lebih besar untuk mendukung program disabilitas. Dalam perspektif *Stewardship Theory* menurut James H. Davis(1997), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengelola keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan sumber daya publik perlu diarahkan pada kepentingan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Kapasitas fiskal daerah seharusnya tidak hanya menunjukkan kemampuan keuangan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyediakan program dan layanan publik yang lebih inklusif.

Regulasi inklusif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait disabilitas dapat mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Menurut Bharata *et al.* (2022), regulasi inklusif mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas,melaui penguatan kebijakan penganggaran yang berorientassi pada kesejahteraan penyandang disabilitas. Sesuai dengan *stewardship theory*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sejalan dengan Hambali dan Amalia (2025), regulasi inklusif dipandang dapat mendukung peningkatan belanja program disabilitas di setiap daerah. Implementasi yang efektif dari peraturan ini sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas, terutama dalam akses layanan publik.

Belanja sosial mencerminkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Alokasi belanja sosial digunakan untuk mendukung program perlindungan sosial dan pelayanan publik yang lebih inklusif. Berdasarkan *stewardship theory*, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengelola anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Akin (2025), belanja sosial dipandang dapat mendorong peningkatan belanja program disabilitas di daerah. Peningkatan belanja sosial bagi penyandang disabilitas dapat mendukung pemenuhan hak dan kebutuhan mereka sekaligus memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial (Hasanah *et al*., 2024). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Arrfah & Syafri (2022) yang menunjukkan bahwa belanja fungsi perlindungan sosial berperan positif dalam kemajuan pembangunan inklusif.

Tingkat Kemiskinan dapat memengaruhi kebutuhan layanan bagi penyandang disabilitas di daerah (Pentury et al., 2023). Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya membutuhkan dukungan perlindungan sosial yang lebih besar, tetapi sering menghadapi keterbatasan keuangan daerah. Tingkat kemiskinan dipandang dapat memengaruhi hubungan kapasitas fiskal, regulasi inklusif, dan belanja sosial terhadap belanja program disabilitas.

Penelitian mengenai belanja program disabilitas masih terbatas dibandingkan penelitian belanja sosial secara umum. Penelitian terkait faktor yang memengaruhi belanja program disabilitas di pemerintah daerah juga belum banyak dilakukan. Penggunaan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi dalam penelitian belanja program disabilitas masih jarang ditemukan pada penelitian sebelumnya.

Isu disabilitas telah banyak dikaji dalam konteks perlindungan sosial dan pembangunan inklusif. Penelitian yang secara khusus membahas belanja program disabilitas pada pemerintah daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti belanja sosial secara umum, efektivitas program perlindungan sosial, atau pemenuhan hak penyandang disabilitas dari aspek regulasi. Program disabilitas di tingkat daerah sangat bergantung pada dukungan anggaran yang konkret dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penelitian mengenai determinan belanja program disabilitas menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran mengenai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kebijakan anggaran.

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengkaji belanja program disabilitas sebagai bentuk keberpihakan anggaran pemerintah terhadap kelompok rentan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas fiskal, regulasi inklusif, dan belanja sosial terhadap belanja program disabilitas dengan menempatkan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan belanja program disabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belanja program disabilitas pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif untuk menguji hubungan kausal antar variabel berdasarkan data empiris (Wahyudin, 2015). Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari data keuangan dan non keuangan. Data keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sedangkan data non-keuangan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian pengujian hipotesis. Studi pengujian hipotesis bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antar variabel (Wahyudin, 2015). Uji statistik pada penelitian ini dilakukan menggunakan alat olah data Stata versi 17.

Tabel 1. Penentuan Ukuran Sampel Menggunakan Tabel Isaac dan Michael untuk Tingkat Kesalahan 1%, 5%, dan 10%

N	S		
	1%	5%	10%
10	10	10	10
15	15	14	14
.....	.....	.....	.....
2000	498	297	238
2200	510	301	241
.....	.....	.....	.....
10000	622	336	263
∞	.....	.....	.....

Sumber: (Sugiyono, 2013)

Tabel 1 menunjukkan bahwa penentuan sampel dilakukan berdasarkan tabel Isaac dan Michael dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara random. Teknik tersebut digunakan untuk memilih pemerintah kabupaten dan kota secara acak dan proporsional dari seluruh provinsi sebagai sampel penelitian. Total observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1040 unit observasi, yang diperoleh setelah data *outlier* pada sampel awal.

Hasil dari kriteria pemilihan sampel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahapan Memperoleh Unit Analisis

Tahapan Perolehan Unit Analisis	Jumlah
Populasi : Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia,	514
Periode pengamatan penelitian tahun 2021-2024	4
Total Populasi	2.056
Jumlah pemerintah daerah yang dijadikan sampel penelitian berdasarkan tabel Isaac dan Michael	1.060
Data outlier yang dikeluarkan dari sampel	(20)
Jumlah unit analisis	1.040

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh penulis, 2026

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik variabel penelitian, serta analisis regresi logistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap Belanja Program Disabilitas. Pengujian dilakukan melalui uji kelayakan model, uji signifikansi parsial, analisis koefisien determinasi (*Pseudo R^2*), serta analisis moderasi dan sensitivitas. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik StataMP versi 17. Definisi dan pengukuran variabel dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Belanja Program Disabilitas (Y)	Belanja program disabilitas merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang secara khusus ditujukan untuk program dan layanan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas (Rahmat et al., 2020).	Variabel dummy (1= memiliki alokasi anggaran program disabilitas, 0 = tidak memiliki alokasi anggaran program disabilitas)
Kapasitas Fiskal (X_1)	Kapasitas Fiskal menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui sumber pendapatan asli daerah serta transfer pemerintah pusat (Arief, 2025).	(PAD/Total Pendapatan)×100%
Regulasi Inklusif (X_2)	Regulasi inklusif merupakan kebijakan pemerintah daerah yang secara eksplisit mengatur perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Ramadhan et al., 2022).	Variabel dummy (1= memiliki perda disabilitas, 0 = tidak memiliki perda disabilitas)

Variabel	Definisi	Pengukuran
Belanja Sosial (X_3)	Belanja sosial yang efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Terru & Kurniawan, 2023)	(Belanja Bantuan Sosial/Total Belanja)×100%
Tingkat Kemiskinan (Z)	Tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Tingkat kemiskinan berperan dalam memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.	(Jumkah Penduduk Miskin/Total Penduduk)×100%

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh penulis, 2026

Belanja Program Disabilitas dalam penelitian ini diukur mengunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk pemerintah daerah yang memiliki alokasi anggaran program disabilitas dan 0 untuk yang tidak memiliki alokasi anggaran tersebut. Pengukuran ini digunakan untuk melihat kemungkinan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja program disabilitas, bukan untuk menilai besar kecilnya nominal anggaran. Kapasitas fiskal diproksikan dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik melalui pendapatan yang dimiliki daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan karakteristik variabel penelitian serta menyajikan temuan empiris penelitian.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. dev	Min	Max
Belanja Program Disabilitas (Y)	0.27	0.44	0.00	1.00
Kapasitas Fiskal (X_1)	0.15	0.11	0.00	0.87
Regulasi Inklusif (X_2)	0.19	0.39	0.00	1.00
Belanja Sosial (X_3)	0.00	0.00	0.00	0.10
Tingkat Kemiskinan (Z)	10.19	5.50	2.23	37.91
PDRB (C_1)	24312.44	40280.53	781.12	485448.90
IPM (C_2)	73.30	4.95	56.45	88.77

Sumber : Output StataMP versi 17 yang diproses penulis, 2026

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan selesai pemilihan estimasi parameter model untuk memastikan validitas model yang digunakan. Karena penelitian ini menggunakan regresi logistik, pengujian asumsi klasik hanya difokuskan pada uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan linear yang tinggi antar variabel independen.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam variabel independen yang digunakan dalam penelitian (Shrestha, 2020). Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF yang masih dalam batas wajar. Nilai VIF tertinggi sebesar 6,03 dengan rata-rata VIF sebesar 3,76, sehingga masih berada di bawah batas normal yang digunakan, yaitu kurang dari 10. Selain itu, seluruh variabel juga memiliki nilai tolerance (1/VIF) lebih dari 0,10. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen dalam model penelitian. Model regresi logistik yang digunakan dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas dan layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

2. Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan karena variabel dependen berbentuk dummy, yaitu ada atau tidaknya alokasi belanja program disabilitas. Analisis regresi logistik dilakukan menggunakan aplikasi Stata MP versi 17, seperti Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Regresi Logistik

Variabel	OR	P-value	Keterangan
X_1	0.00	0.00	Signifikan
X_2	0.40	0.05	Tidak Signifikan
X_3	0.00	0.60	Tidak Signifikan
Z	0.89	0.00	Signifikan
C_1	1.00	0.67	Tidak Signifikan
C_2	0.98	0.48	Tidak Signifikan
ZX_1	1.82	0.00	Signifikan
ZX_2	1.10	0.03	Signifikan
ZX_3	0.77	0.83	Tidak Signifikan
Jumlah Observasi			
Wald chi2(9) = 48.18			
Prob >chi2 = 0.00			
Pseudo R2 = 0.0397			
= 1,040			

Sumber: Data diolah penulis menggunakan Stata MP versi 17, 2026

Hasil regresi logistik pada Tabel 5 menunjukkan model penelitian signifikan secara statistik dengan nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000 dan nilai Pseudo R^2 sebesar 0,0397. Secara parsial, .Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Program Disabilitas. Regulasi Inklusif dan Belanja Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja program disabiltas.

Tingkat Kemiskinan sebagai variabel moderasi menunjukkan interaksi Tingkat Kemiskinan dengan Kapasitas Fiskal dan Regulasi Inklusif berpengaruh signifikan terhadap belanja program disabilitas. Sedangkan interaksi Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Sosial tidak menunjukkan pengaruh signifikan.

Variabel dependen dalam penelitian ini berbentuk dummy, sehingga hasil regresi logistik diinterpretasikan sebagai peluang atau kemungkinan pemerintah daerah memiliki belanja program disabilitas. Nilai signifikansi menunjukkan pengaruh suatu variabel secara statistik. Nilai *odds rasio* di bawah 1 menunjukkan kecenderungan penurunan peluang, sedangkan nilai *odds rasio* di atas 1 menunjukkan peningkatan peluang.

3. Uji Kelayakan Model Regresi Logistik

Uji kelayakan model dilakukan untuk menilai kesesuaian model regresi logistik dengan data penelitian menggunakan *Likehood Rasio (LR)* dan *Hosmer and Lemeshow Test.* Hasil pengujian menunjukkan model memenuhi kriteria kelayakan, sehingga layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel Belanja Program Disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal, Regulasi Inklusif, Belanja Sosial, Tingkat Kemiskinan, serta variabel interaksi mampu membentuk model estimasi yang memadai.

Goodness of Fit Test

Uji goodness of fit pada model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan pearson chi-square untuk menilai tingkat kesesuaian antara nilai yang diobservasi dan nilai yang diprediksi oleh model. Hasil pengujian menunjukkan nilai pearson chi2(1030) sebesar 151,71 dengan nilai signifikansi (Prob > chi2) sebesar 0,06185. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol (H0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai observasi dan nilai prediksi model. Dengan demikian, model regresi logistik yang digunakan dapat dinyatakan sudah sesuai dengan data penelitian

dan memiliki tingkat kecocokan yang memadai. Hasil ini mengindikasikan bahwa spesifikasi model sudah mampu merepresentasikan pola data secara cukup baik, sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

1. Uji Koefisien Determinasi *(Pseudo R square)*

Koefisien determinasi pada regresi logistik digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen melalui nilai Pseudo R^2. Hasil pengujian menunjukkan nilai Pseudo R^2 pada model 5 sebesar 0,0397 atau 3,97 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal, regulasi inklusif, belanja sosial, tingkat kemiskinan, dan variabel kontrol mampu menjelaskan belanja program disabilitas sebesar 3,97 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Nilai Pseudo R^2 pada regresi logistik umumnya lebih kecil dibandingkan regresi linier, sehingga interpretasi penelitian lebih menekankan pada arah dan signifikansi koefisien variabel.

Tabel 6. Analisis Senitivitas

Variabel	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
X_1	-2.79*	-2.95*	-8.12*	-8.34*	-7.80*
	(0.73)	(1.09)	(1.82)	(1.90)	(2.06)
X_2	0.10	0.10	-0.91	-0.90	-0.91
	(0.18)	(0.18)	(0.49)	(0.49)	(0.49)
X_3	-18.94**	-19.09**	-8.15	-8.29	-7.98
	(9.47)	(9.49)	(18.35)	(18.38)	(18.33)
Z	-	-	-0.10**	-0.10*	-.011*
			(0.02)	(0.02)	(0.02)
ZX_1	-	-	0.61*	0.61*	0.60*
			(0.20)	(0.19)	(0.20)
ZX_2	-	-	0.09**	0.09**	0.09**
			(0.046)	(0.046)	(0.04)
ZX_3	-	-	-0.27	-0.28	-0.24
			(1.54)	(1.54)	(1.53)
C_1	-	0.00	-	0.00	0.00
		(0.00)		(0.00)	(0.00)
C_2	-	-0.00	-	-	-0.14
		(0.19)			(0.02)
R^2	0.0174	0.0174	0.0392	0.0393	0.0397

Catatan: *signifikansi 1%, **signifikansi 5%

Sumber : Data sekunder yang diolah oleh penulis, 2026

Hasil uji sensitivitas pada tabel 6 menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup stabil meskipun dilakukan beberapa perubahan spesifikasi pada model 1 hingga model 5. Variabel Kapasitas Fiskal (X_1) secara konsisten menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan di semua model dengan kecenderungan nilai koefisien yang semakin besar secara absolut (dari -2,79 hingga -7,80). Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh X1 terhadap variabel dependen bersifat robust dan tidak berubah meskipun terdapat penambahan variabel kontrol maupun variabel moderasi. Sementara itu, variabel Regulasi Inklusif (X_2) menunjukkan pola yang tidak stabil. Pada model 1 dan model 2 koefisien X_2 bernilai positif, namun pada model berikutnya berubah menjadi negatif dan tetap tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa X_2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Variabel Belanja Sosial (X_3) menunjukkan hasil yang cukup sensitif terhadap perubahan model. Pada model 1 dan model 2, X_3 berpengaruh negatif dan signifikan, namun ketika model diperluas, signifikansinya menjadi lemah meskipun pengaruhnya tetap negatif. Hal ini menandakan bahwa kekuatan pengaruh X_3 tidak sepenuhnya stabil ketika variabel lain dimasukkan ke dalam model. Variabel moderasi Tingkat Kemiskinan (Z) menunjukkan pengaruh negatif signifikan pada model 3 hingga model 5. Kondisi ini mengindikasikan variabel moderasi memberikan efek langsung yang konsisten pada model yang lebih lengkap.

Pada bagian interaksi, ZX_1 dan ZX_2 menunjukkan hasil positif dan signifikan secara konsisten. Temuan ini mengindikasikan peran Z dalam memperkuat hubungan X_1 dan X_2 terhadap variabel dependen. Berbeda dengan itu, interaksi ZX_3 tidak menunjukkan signifikansi pada seluruh model, sehingga Z tidak berperan sebagai moderator pada hubungan X_3 dengan variabel dependen. Nilai *R-squared* mengalami peningkatan dari 0,0174 menjadi 0,0397 pada model 5. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan beberapa hubungan dalam model memiliki kekuatan dan konsistensi yang cukup baik, terutama pada X_1 serta interaksi ZX_1 dan ZX_2.

2. Uji Signifikansi Parsial *(Wald Test)*

Uji signifikansi parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja program disabilitas menggunakan statistik Wald pada tingkat signifikansi 5 persen. Hasil pengujian menunjukkan kapasitas fiskal berpengaruh signifikan terhadap belanja program disabilitas. Belanja sosial hanya signifikan pada model awal, sedangkan regulasi inklusif tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Pada variabel moderasi, interaksi tingkat kemiskinan dengan kapasitas fiskal serta regulasi inklusif menunjukkan pengaruh signifikan terhadap belanja program disabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap kebijakan belanja program disabilitas pemerintah daerah.

Pembahasan

1. Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Program Disabilitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Program Disabilitas. Kondisi ini menunjukkan kekuatan keuangan daerah berperan penting dalam menentukan besarnya alokasi anggaran untuk program disabilitas. Daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan pendanaan yang lebih baik untuk mendukung program perlindungan sosial dan layanan publik bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini terjadi karena daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih luas sehingga mampu mengalokasikan belanja pada sektor-sektor non prioritas dasar, termasuk program disabilitas. Sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung memprioritaskan anggaran pada kebutuhan dasar dan belanja rutin pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat daerah.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan hasil penelitian dari (Murshed et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kapasitas fiskal berperan penting dalam meningkatkan kualitas belanja publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Uddin et al., 2026) yang menyatakan bahwa pengeluaran publik yang bersifat inklusif seperti belanja sosial, kesehatan, dan perlindungan sosial mampu mendukung pembangunan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan apabila didukung oleh kapasitas fiskal dan kerangka kelembagaan yang kuat. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih besar belum tentu meningkatkan perhatian pemerintah daerah terhadap isu disabilitas. Sumber daya fiskal dapat dialihkan ke sektor lain yang dinilai lebih mendesak, seperti infrastruktur, pelayanan dasar, atau belanja rutin. Kapasitas fiskal perlu didukung komitmen kebijakan dan perencanaan yang responsif terhadap kelompok rentan agar mampu mendorong penganggaran yang lebih inklusif. Kapasitas fiskal berperan penting, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberadaan belanja program disabilitas di pemerintah daerah.

2. Pengaruh Regulasi Inklusif terhadap Belanja Program Disabilitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa Regulasi Inklusif tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja program disabilitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan regulasi daerah terkait disabilitas belum mampu mendorong peningkatan alokasi anggaran secara nyata. Kondisi ini mengindikasikan penerapan regulasi belum diikuti dukungan penganggaran yang memadai. Dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah telah memiliki regulasi inklusif,

namun pelaksanaan masih terkendala kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, dan pengawasan kebijakan yang belum optimal. Hasil ini menunjukkan regulasi formal saja belum cukup untuk meningkatkan belanja program disabilitas tanpa dukungan anggaran dan kapasitas kelembagaan yang kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Frandell & Allgood, 2026) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijkan inklusif di pemerintah daerah memerlukan dukungan organisasi, pengawasan berkelanjutan, dan kapasitas institusi agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Temuan ini juga didukung oleh (Herman et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan inklusif tidak hanya bergantung pada adanya kebijakan, tetapi juga pada sumber daya yang tersedia, dukungan organisasi, dan kerja sama antar instansi. Pendanaan dan kapasitas pelaksana yang terbatas dapat menghambat penerapan kebijakan secara optimal. Uneke et al. (2023) menjelaskan bahwa kebijakan dan mekanisme kelembagaan belum tentu menghasilkan implementasi yang efektif apabila tidak didukung pendanaan yang memadai, koordinasi yang baik, dan komitmen institusi yang kuat. Oleh karena itu, regulasi inklusif yang telah ditetapkan pemerintah daerah belum tentu mampu mendorong peningkatan belanja program disabilitas apabila tidak diikuti dukungan sumber daya dan pelaksana yang memadai. Hasil penelitian ini mengarah pada kemungkinan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan kebijakan. Regulasi daerah belum tentu mendorong program atau anggaran yang memadai tanpa mekanisme implementasi yang jelas. Efektivitas regulasi sangat bergantung pada dukungan sumber daya, koordinasi antar organisasi perangkat daerah, dan komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan aturan ke dalam programnya.

3. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Belanja Program Disabilitas

Hasil regresi menunjukkan bahwa Belanja Sosial berpengaruh terhadap Belanja Program Disabilitas pada model awal, namun pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan setelah menambahkan variabel moderasi dan variabel kontrol. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja sosial daerah belum difokuskan pada program disabilitas karena anggaran sosial masih lebih banyak diarahkan pada bantuan sosial umum, penanggulangan kemiskinan, dan program kesejahteraan lainnya. Hal ini menunjukkan peningkatan belanja sosial belum tentu diikuti peningkatan anggaran program disabilitas secara spesifik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Li et al. (2023) yang menunjukkan bahwa manfaat perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas akan lebih optimal apabila diberikan melalui program yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Mont et al. (2023) yang menegaskan bahwa kebijakan perlindungan sosial yangg inklusif memerlukan alokasi sumber daya yang secara khusus mempertimbangkan biaya tambahan yang ditanggung penyandang disabilitas. Oleh karena itu, efektivitas belanja sosial dalam mendukung penyandang disabilitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari realisasi anggaran tersebut diarahkan pada program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan sebagai Pemoderasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan mampu memperkuat pengaruh Kapasitas Fiskal dan Regulasi Inklusif terhadap Belanja Program Disabilitas. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menghadapi kebutuhan sosial yang lebih kompleks, termasuk pemenuhan layanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. (Banks et al., 2021) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas umunya memiliki kemampuan yang lebih terbatas dalam menghadapi tekanan ekonomi karena sebagian besar berada pada kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Penyandang disabilitas juga menghadapi biaya tambahan seperti layanan kesehatan, alat bantu, transportasi ramah disabilitas, dan pendampingan, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat kapasitas fiskal daerah memiliki peran penting dalam mendukung alokasi anggaran program disabilitas. Regulasi inklusif juga lebih efektif diterapkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi , karena pemerintah daerah memiliki dorongan yang

lebih besar untuk mengarahkan kebijakan dan anggaran kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan tidak mampu memperkuat pengaruh Belanja Sosial terhadap Belanja Program Disabilitas. Peningkatan tingkat kemiskinan belum sepenuhnya diikuti dengan pengalokasian belanja sosial yang lebih fokus pada program disabilitas. Pemerintah daerah pada umumnya masih memprioritaskan bantuan sosial yang bersifat umum bagi masyarakat miskin dibandingkan program yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses perlindungan sosial sehingga kebutuhan mereka belum sepenuhnya diperhatikan dalam kebijakan kesejahteraan sosial (Cote, 2021). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan penganggaran program disabilitas masih membutuhkan perhatian yang lebih spesifik agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal dalam belanja sosial daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya menggambarkan kondisi sosial ekonomi daerah, tetapi juga menentukan seberapa kuat kebijakan fiskal dan regulasi inklusif bekerja. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki tekanan lebih besar untuk memperhatikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam kondisi tersebut, kapasitas fiskal dan regulasi inklusif lebih berperan dalam mendorong realisasi belanja program disabilitas dibanding daerah dengan tingkat kemiskinan rendah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kapasitas Fiskal, Regulasi Inklusif, dan Belanja Sosial terhadap Belanja Program Disabilitas pada pemerintah daerah dengan Tingkat Kemiskinan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Program Disabilitas, sedangkan Regulasi Inklusi dan Belanja Sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan keberadaan regulasi fornal belum cukup untuk mendorong penganggaran program disabilitasapabila tidak disertai implementasi, komitmen kelembagaan, dan dukungan anggaran yang memadai. Belanja sosial masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya diarahkan pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama yang mendukung pengalokasian anggaran bagi penyandang disabilitas. Daerah dengan kondisi fiskal yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mendukung program inklusif. Sedangkan regulasi inklusif dan belanja sosial belum mampu meningkatkan belanja program disabilitas secara optimal karena anggaran masih terbatas dan alokasi belanja sosial masih bersifat umum.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat kemiskinan mampu memperkuat pengaruh kapasitas fiskal dan regulasi inklusif terhadap belanja program disabilitas. Temuan ini menunjukkan tekanan sosial ekonomi yang tinggi dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui peningkatan alokasi anggaran. Namun, tingkat kemiskinan tidak mampu memperkuat pengaruh belanja sosial terhadap belanja program disabilitas karena belanja sosial daerah belum diarahkan secara khusus pada kebutuhan penyandang disabilitas.

Penelitian ini menegaskan bahwa penganggaran program disabilitas tidak hanya bergantung pada kapasitas fiskal daerah, tetapi juga pada prioritas kebijakan, implementasi regulasi, dan ketepatan sasaran belanja sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan dan penganggaran yang responsif disabilitas agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan dengan belanja program disabilitas agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap determinan penganggaran program disabilitas di tingkat pemerintah daerah.

REFERENSI

Akin, H. (2025). Analysis of Social Protection Expenditures for Disabled Individuals : The Case of Türkiye. 9(3).

Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daera. 5, 2909–2914.

Arrfah, A. P., & Syafri, S. (2022). Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Provinsi Sulawesi Tengah. Info Artha, 6(2), 159–166. https://doi.org/10.31092/jia.v6i2.1890

Banks, L. M., Davey, C., Shakespeare, T., & Kuper, H. (2021). Disability-inclusive responses to COVID-19 : Lessons learnt from research on social protection in low- and middle-income countries. World Development, 137, 105178. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105178

Cote, A. (2021). Social Protection And Access To Assistive Technology In Low- And Middle-Income Countries. Assistive Technology, 33(1), 102–108. https://doi.org/10.1080/10400435.2021.1994052

Davis, J. H. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.

Frandell, A., & Allgood, M. (2026). Social Breaking Barriers: Evaluating Accessibility In Local Government Online Platforms For Individuals With Disabilities. Government Information Quarterly, 43(1), 102111. https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102111

Hambali, & Amalia, F. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Dalam Hak Aksesibilitas. 15(10).

Hasanah, M., Giyanto, & Fitriyah, N. S. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 59 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. 20(1), 15–25.

Herman, C., Vanderbom, K., Edwards, K., & Eisenberg, Y. (2024). Perceived Barriers and Facilitators to Implementation of Inclusive Policy , Systems , and Environmental Changes. 27–40. https://doi.org/10.3390/disabilities4010003

June, M., Sriyanti, C., Muhammad, A. S., & Suswaini, E. (2023). Inclusive Village , Review of Village Government Capacity in Empowering Disabilities (Study in Sumberrahayu Village , Kapanewon Moyudan , Sleman Regency , Special Region of Yogyakarta). 1(2), 23–27.

Kafaa, K. A. (2023). An Inclusive Social Health Insurance for People with Disabilities in Three Southeast Asia Countries : A Systematic Review. 103–122.

Katuka, B., & Mudzingiri, C. (2026). Fiscal Space , Governance Quality And Inclusive Growth : Evidence From Africa. 16(1), 80–101. https://doi.org/10.1108/JFEP-07-2023-0197

Li, Z., Wang, H., Chen, S., Kong, Y., Xie, L., Zhang, X., Lu, C., Subramanian, S. V, & Cohen, J. L. (2023). The Association Of A Disability-Targeted Cash Transfer Programme With Disability Status And Health-Care Access : A Quasi-Experimental Study Using A Nationwide Cohort Of 4 · 3 Million Chinese Adults Living With Severe Disabilities. The Lancet Public Health, 8(12), e933–e942. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(23)00215-3

Marsitadewi, K. E. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas. 8(2), 239–252.

Mont, D., Banks, L. M., Carraro, L., Cote, A., Hanass-hancock, J., Mitra, S., Morris, Z., Nasiir, M., & Pinilla-roncancio, M. (2023). Methods for Estimating the Impact of Disability Costs for Designing Inclusive Policies. 539–549. https://doi.org/10.3390/disabilities3040034

Murshed, S. M., Bergougui, B., Badiuzzaman, M., & Pulok, M. H. (2022). Fiscal Capacity, Democratic Institutions and Social Welfare Outcomes in Developing Countries. Defence and Peace Economics, 33(3), 280–305. https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1817259

Pentury, F. E., Tinggi, S., Ekonomi, I., Bulan, J., Timika, I., Renjaan, M. G., & Sabir, M. (2023). Analisis Penyediaan Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dan Aksebilitasnya Di Kabupaten Mimika. JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1(7), 1154–1175.

Pudyatmoko, Y. S., & Indra, D. I. (2017). Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta. 31–42.

Rahmat, A. F., Purnomo, E. P., Mutiarin, D., & Malawani, A. D. (2020). Education Budget Politics: Is It Pro-Disabilities? Case of Yogyakarta Municipality, Indonesia. IJDS Indonesian Journal of Disability Studies, 7(2), 266–279. https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2020.007.02.15

Ramadhan, M. A., Heryani, A., & Ramdani, A. (2022). Adaptive Governance Dalam Pelayanan Disabilitas Di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9(2), 239. https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.8324

Shrestha, N. (2020). Detecting Multicollinearity in Regression Analysis. 8(2), 39–42. https://doi.org/10.12691/ajams-8-2-1

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.

Terru, I., & Kurniawan, B. A. (2023). Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. 6, 425–430.

Uddin, G. S., Le, A. H., Hasan, M. B., Beirne, J., & Park, D. (2026). Public Spending And Inclusive Growth: A Cross-Country Empirical Analysis. Journal of International Money and Finance, 162(January), 103528. https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2026.103528

Uneke, C. J., Nkem, I., Alex, O., Akamike, I. C., Uneke, B. I., Eze, I. I., Chukwu, O. E., Otubo, K. I., & Urochukwu, H. C. (2023). Institutional Roles , Structures , Funding And Research Partnerships Towards Evidence Informed Policy Making : A Multisector Survey Among Policy Makers In Nigeria. Health Research Policy and Systems, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12961-023-00971-1

Wahyudin, A. (2015). Metodologi Penelitian.

Widijantoro, J., Antoro, H. W., & Hardjani, D. K. (2021). Policy Development in Inclusion Villages towards the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. 5(June). https://doi.org/10.19184/jseahr

Wira Bharata, R., Afidatul Khotijah, S., & Priyono, N. (2022). Identitas Inklusif Dalam Penganggaran Disabilitas. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 23(1), 1–13.